

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar

Jihan Humaira¹, Dinie Anggraeni Dewi², Yayang Furi Furnamasari³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia
Email : jihannh95@upi.edu¹ , Dinianggraenidew@upi.edu² , furi2810@upi.edu³

Abstrak

Pendidikan merupakan awal membentuk seseorang untuk menjadi lebih baik dengan Pendidikan pula seseorang dapat membentuk diri jauh dari hal-hal yang tercela, seperti tindakan korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang salah menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mengambil keuntungan . Korupsi sebuah tindakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menemukan ide-ide dasar kerangka konseptual teoritis dan implementatif pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan yang lainnya. Hasil penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mendukung pengembangan karakter siswa melalui pendidikan anti korupsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Pengembangan silabus, indikator, tujuan, skenario, sumber belajar, media, model, metode, strategi pembelajaran, dan alat evaluasi perlu diperbaiki karena ada banyak kekurangan untuk dapat memperkuat karakter bangsa. Peran Guru sangat penting bagi siswa untuk memberikan pemahaman tentang apa itu Tindakan Korupsi dan juga berperan menanamkan nilai-nilai kejujuran terhadap siswa, agar siswa Dapat melakukan sebuah tindakan yang jujur dan tidak melakukan suatu kebohongan atau tindak Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa sekolah dasar bahwa Korupsi itu adalah tindakan yang tidak terpuji dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Pendidikan anti korupsi di sekolah dasar

Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan, Siswa Sekolah Dasar

Abstract

Education is the beginning of forming a person to become better. With education, a person can also shape himself away from despicable things, such as acts of corruption. Corruption is the act of someone wrongly abusing trust in an issue or organization to take advantage. Corruption is a crime that is detrimental to state finances. This study aims to examine and find the basic ideas of the theoretical conceptual framework and the implementation of anti-corruption education through Civic Education learning for elementary school students. The method used in this study is a research method with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are carried out by studying literature from various sources such as books, journals and others. The results of this study are the factors that support the development of student character through anti-corruption education are divided into two categories, namely internal and external. The development of syllabus, indicators, objectives, scenarios, learning resources, media, models, methods, learning strategies, and evaluation tools need to be improved because there are many shortcomings to be able to strengthen the nation's character. The role of the teacher is very important for students to provide an understanding of what acts of corruption are. and also plays a role in instilling the values of honesty in students, so that students can take an honest action and not commit a lie or act of corruption. This study aims to provide an understanding to elementary school students that

corruption is an act that is not commendable and to find out how the application of anti-corruption education in elementary schools

Keywords: Anti-Corruption Education, Citizenship Education, Elementary School Students

PENDAHULUAN

Korupsi Kemosrotan adalah isu yang paling memprihatinkan dilihat oleh bangsa dan negara ini. Pelanggaran kemosrotan terjadi mulai dari kekotoran yang sangat mendasar, misalnya, membayar dengan pengeluaran minimal untuk mempermudah saat melakukan organisasi di kota hingga kehinaan besar. Dari kasus dasar ini, negara dibentuk untuk mencoba memusnahkan praktik kriminal ini dan untuk menghapus dan membunuh kekotoran batin di Indonesia adalah dengan membingkai organisasi negara yang diberikan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Mansyur, 2008).

Pemerintah Republik Indonesia secara konsisten berusaha untuk membunuh kemosrotan dengan teknik dan strategi yang paling potensial. Otoritas publik telah membuat yayasan yang secara eksplisit memerangi dan membunuh pencemaran nama baik, khususnya KPK, sebagai organisasi bebas yang telah menempuh berbagai upaya pencegahan pencemaran nama baik. Memerangi kekotoran adalah kewajiban dari berbagai bagian di negara ini, jika dengan keberuntungan salah satu pihak memerangi kekotoran, maka, pada saat itu, kekuatannya sangat tidak berdaya dan tidak ada habisnya. Dengan demikian, dapat menimbulkan kekecewaan atau kekecewaan terhadap pelenyapan kekotoran batin, suatu bangsa akan dianggap maju/mencipta jika berhasil melakukan perbaikan-perbaikan yang berbeda sebagai salah satu bentuk kemajuan negara.

Akibatnya, kemajuan adalah jenis kemajuan yang menggabungkan berbagai aktivitas publik. Terlebih lagi, pada akhirnya, kekotoran batin muncul dengan dimulainya upaya perbaikan kerangka kerja yang telah direncanakan, namun interaksi regulasi umumnya lamban, sehingga mereka membutuhkan jalur alternatif dengan memberikan hadiah/imbalan. Hal ini terjadi terus-menerus dan tidak dibatasi oleh otoritas publik dan masyarakat sehingga ada kumpulan orang-orang yang memperbaiki diri dengan kehinaan yang tidak menjadi teladan sejati bagi usia yang lebih muda, terutama anak-anak usia sekolah dasar. Sejalan dengan itu, hal ini sering terjadi di antara kelas dunia politik dengan kekuatan yang mereka miliki dan dapat dengan mudah melakukan demonstrasi kriminal kekotoran batin. Penganiayaan dengan kekerasan dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan perkumpulan, oleh karena itu keberadaan KPK sangat penting di negeri ini dan menjadi sangat vital jika dimulainya program pendidikan penanggulangan pencemaran nama baik di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar. seseorang bergabung dengan area lokal nanti.

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas publik dalam menanamkan musuh watak kehinaan pada siswa di lingkungan sekolah. Penghinaan itu sendiri bukanlah demonstrasi yang merugikan banyak individu dengan memanfaatkan posisi untuk penambahan individu. Kekotoran batin yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai standar, misalnya membayar, pemerasan dan pemerasan dapat terjadi di wilayah otoritas publik yang akan berubah menjadi infeksi yang memusnahkan seluruh bagian kehidupan (Hamilton-Hart, 2001). Pada dasarnya, pelatihan permusuhan terhadap kemosrotan dapat diartikan sebagai program instruktif yang menjelaskan dan mengalahkan kekotoran batin yang berbeda yang terjadi secara lokal dengan menanamkan musuh jiwa kemosrotan pada waktu yang tepat dengan niat penuh untuk membangun dan memperluas keakraban penduduk dengan risiko dan hasil demonstrasi. dari kekotoran. Sekolah bermusuhan dengan kemosrotan memiliki tiga tujuan, pertama, untuk membentuk informasi dan pemahaman tentang jenis-jenis kekotoran batin dan perspektifnya. Kedua, mengubah penegasan dan perspektif menuju kemosrotan. Ketiga, membingkai kemampuan dan kemampuan baru yang ditujukan untuk memerangi kemosrotan (Hakim, 2012).

Pelaksanaan pelatihan permusuhan terhadap penurunan nilai dimulai di sekolah-sekolah pada tahun 2010 selama periode pelaksanaan Standar Isi 2006 (selanjutnya disebut sebagai periode pelaksanaan Kurikulum 2006). Hal ini didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012, yang menurunkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai individu yang memegang kendali untuk melakukan langkah pemberantasan pencemaran nama baik pendidikan sebagai tambahan pribadi masyarakat. program pendidikan di pelatihan esensial dan opsional, yang sepenuhnya bertujuan untuk mengkoordinasikan musuh penurunan harga diri dalam rencana pendidikan sekolah dasar dan tambahan (Sekretariat Negara, 2011), mengingat fakta bahwa musuh pencemaran nama baik belum secara tegas diwajibkan. dalam Kurikulum 2006 (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Demikian juga, tentu saja, penting juga untuk menanamkan watak musuh kekotoran batin pada siswa dalam setiap interaksi pembelajaran. Disposisi merupakan bagian penting dalam membina cara hidup atau karakter siswa dalam berbuat kebaikan. Seperti yang ditunjukkan oleh Sax (1997, hlm. 493) disposisi adalah "kecenderungan sepanjang elemen idealitas menuju ketidakberpihakan pada kumpulan, organisasi, ide, atau item tertentu." Otoritas publik harus memastikan dan mengatur instruksi terhadap pencemaran dengan tujuan bahwa tujuan yang mendasari dan fokus dalam pelaksanaan pelatihan anti pencemaran dapat benar-benar dipahami dan diproses secara tepat oleh instruktur yang mendukung mata pelajaran yang diidentifikasi dengan sekolah anti pencemaran.

Pendidik serta tugas yayasan sekolah dalam pelaksanaan dan pelaksana kerangka pelatihan juga harus mengambil bagian. Tanpa kerjasama yang baik antara para pendidik dan organisasi sekolah, khususnya kepala sekolah sebagai produsen penataan langsung, tidak terbayangkan program-program pembelajaran tandingan yang telah disusun oleh otoritas publik mulai sekitar tahun 2009 hingga saat ini dapat terlaksana.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran wajib dalam rencana pendidikan tahun 2013. Subjek ini tidak diragukan lagi mengandung materi yang diidentifikasi dengan pelatihan permusuhan terhadap kekotoran batin. Mengingat bahwa bahan pelajaran sekolah musuh kekotoran tidak tetap tunggal sebagai mata pelajaran wajib. Hal yang sangat mirip dengan pendidikan karakter bahwa meskipun tidak menjadi mata pelajaran yang berbeda yang diajarkan dalam sistem pembelajaran di sekolah, materi pelatihan anti pencemaran dan materi pelatihan karakter harus digabungkan dengan topik lain, terutama dalam mata pelajaran. Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan. Sesuai dengan hal tersebut, tentunya mata pelajaran PKN sangat tepat sebagai wahana perubahan informasi Pendidikan Anti Korupsi di setiap wali kelas.

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengandung sifat-sifat pribadi masyarakat. Kewarganegaraan adalah pelatihan yang mampu menghimpun keakraban warga dalam menyelesaikan hak dan komitmennya sebagai warga dengan tujuan akhir membentuk karakter warga suatu negara. Pembelajaran PKN harus bergantung pada kemampuan dasar kewarganegaraan (urban skill) untuk semua tingkatan. Oleh karena itu, agar pembelajaran menjadi kuat dan siap untuk melengkapi siswa dengan informasi dan mencapai kemampuan kewarganegaraan yang penting, dalam menciptakan latihan pembelajaran penting untuk fokus pada beberapa hal. Kegiatan Pembelajaran PKN pada awalnya diselenggarakan untuk memberikan bantuan kepada para pengajar (pendidik), untuk melengkapi sistem pembelajaran secara ahli. Kedua, latihan pembelajaran PKN berisi rangkaian latihan yang harus dilakukan siswa secara berkelompok untuk mencapai kemampuan dasar. Ketiga, menentukan susunan latihan pembelajaran PKN harus sesuai dengan rantai komando ide materi pembelajaran. Keempat, penjabaran artikulasi dalam latihan pembelajaran PKN mengandung tidak kurang dari dua komponen yang mencerminkan penyelenggaraan pertemuan belajar siswa.

Mata pelajaran PKN memiliki misi yang sangat mulia. Sesuai dengan misi PKN, Maftuh (2008, hlm. 137) berpendapat bahwa dengan kemajuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang begitu mutakhir dengan segala kesulitannya, Pendidikan Kewarganegaraan saat ini mengemban misi sebagai berikut: 1) PKN sebagai Pendidikan

Politik; 2) PKn sebagai Pendidikan Nilai; 3) PKn sebagai Pendidikan Nasionalisme; 4) PKn sebagai Pendidikan Hukum; 5) PKn sebagai Pendidikan Multikultural; dan 6) PKn sebagai Pendidikan Resolusi Konflik.

Misi tersebut tentunya merupakan tujuan bagaimana mata pelajaran PKn dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pemberantasan pencemaran nama baik pada siswa sebagai salah satu kualitas pendidikan yang harus diciptakan. Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan pembelajaran anti najis dalam mata pelajaran PKn sebagai salah satu kualitas pendidikan. Sehingga harus dilaksanakan secara ideal dalam setiap interaksi pembelajaran. Rencana pendidikan 2013 mengklarifikasi bahwa sistem pembelajaran yang dibuat dalam setiap siklus pembelajaran harus menerapkan pemanfaatan nilai-nilai pribadi masyarakat berdasarkan kualitas dasar negara Pancasila. Peningkatan sudut sosial, informasi dan kemampuan harus menjadi perhatian utama dengan harapan target pembelajaran yang disampaikan dapat tercapai.

Pelatihan melawan kekotoran batin sangat penting untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah dan cocok bila dimulai di sekolah dasar. Menurut Hakim (2012), pembelajaran melawan kekotoran adalah pelatihan yang memberikan informasi, teknik dan kegiatan tentang musuh kekotoran batin secara wajar yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam bagian-bagian mata pelajaran yang sekarang ada di sekolah-sekolah seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sekolah anti-kerendahan hati juga dapat diterapkan sebagai mata pelajaran, misalnya, pelajaran ekstrakurikuler dan konten lingkungan (kelembagaan).

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telaah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa di sekolah dasar.

Hakekat Korupsi

Korupsi sering kali berawal dari kecenderungan yang tidak dipahami, misalnya mendapatkan hadiah oleh pejabat negara/pegawai pemerintah dalam acara pribadi atau pemberian jabatan tertentu yang tidak masuk akal dari kaki tangan. Hal seperti ini akan berubah menjadi kecenderungan dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan mempengaruhi dinamika oleh otoritas terkait. Pada tingkat tertentu, hadiah tersebut dianggap sah, namun perlu dipahami bahwa hadiah tersebut biasanya diidentikkan dengan bisnis sesuai dengan posisi yang dipegang oleh penerimanya. Memberi dari perspektif yang luas, lebih spesifik memberi hadiah, produk, pengembalian uang (limit), komisi, kredit tanpa bunga, tiket perjalanan, kantor hunian, perjalanan pelancong, perawatan klinis gratis, dan berbagai kantor dapat disebut tip. Setiap tip kepada pegawai pemerintah atau kepala negara menawarkan imbalan ketika diidentifikasi dengan posisi mereka dan yang bertentangan dengan memberi atau memberi (UU No. 20 Tahun 2001).

Arti debasement yang paling luas disinggung, termasuk oleh Bank Dunia dan UNDP adalah "penganiayaan jabatan publik untuk peningkatan swasta". Dari perspektif yang lebih luas, makna kekotoran batin adalah kekuatan publik untuk kepentingan pribadi atau pribadi yang merugikan populasi umum dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan hukum yang relevan (Paus, 1997).

Arti yang tepat dari kata kekotoran batin adalah kebusukan, penyalahgunaan, korupsi, sifat menipu, pembayaran, perilaku tidak etis, penyimpangan dari selibat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekotoran batin dicirikan sebagai kegiatan yang mengerikan seperti penyelewengan uang tunai, penerimaan pembayaran, dll" (Poerwadarminta, 1982).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa debasement adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada orang lain, untuk peningkatan individu. Debasement dapat terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu: (1) individu memiliki kemampuan untuk memutuskan pendekatan publik dan melakukan strategi tersebut, (2) keuntungan finansial yang ada karena pengaturan publik tersebut, dan (3) kerangka kerja saat ini terbuka. celah untuk terjadinya pelanggaran. oleh masyarakat umum yang bersangkutan. Apabila salah

satu dari ketiga batasan tersebut tidak terpenuhi, maka aktivitas yang terjadi tidak dapat dianggap sebagai demonstrasi kekotoran batin (Arvin, 2001).

Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan

PKn sering juga disebut Pendidikan Kewarganegaraan, yang mengkaji tentang kewarganegaraan, etika, norma, hukum, karakter dan lain-lain. Pengajaran Metro adalah program edukatif yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk menciptakan dan melindungi kehormatan dan kebajikan yang berakar pada kehidupan negara yang diandalkan untuk menjadi karakter yang ditunjukkan sebagai perilaku sehari-hari. rutinitas mahasiswa baik sebagai manusia, sebagai instruktur/guru yang direncanakan, individu daerah dan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berkonsentrasi pada PKn, diyakini mahasiswa dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkarakter. Pelatihan kota membantu siswa dengan membina mentalitas dan perspektif sebagai penduduk yang mencerminkan atau bersahabat dengan kualitas manusia. Dikenal untuk pengembangan karakter atau karakter, karena pengajaran kota memasukkan nilai-nilai kehidupan yang umum dari daerah sekitarnya. Alasan utama sekolah kota adalah untuk mendorong pengetahuan dan perhatian kepada negara, serta untuk membentuk perspektif dan perilaku yang sensitif untuk menghargai negara tergantung pada budaya publik yang harus dimiliki oleh penduduk yang meliputi; kemampuan ilmiah dan kemampuan investasi. Untuk sementara, tata krama perkotaan diidentikkan dengan pribadi dan publik warga yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pemerintahan kerakyatan yang keramat.

Sapriya (2007) berdasarkan penilaian Hanna dan Lee (1962) merekomendasikan bahwa materi IPS dapat menggabungkan 3 (tiga) sumber, lebih spesifiknya pertama, materi kasual yang dapat ditemukan dalam latihan daerah, latihan individu DPR. , latihan resmi, dan lain-lain. lainnya. Kedua, disiplin substansi konvensional yang menggabungkan topografi, sejarah, teori politik, masalah keuangan, humanisme, penalaran, humaniora, dan hukum. Ketiga, reaksi mahasiswa, khususnya reaksi mahasiswa, baik substansi kasual maupun substansi formal. Materi ini dapat dibuat pada substansi atau isi PKn dengan catatan harus disesuaikan dengan visi, misi, dan atribut PKn.

Dalam hal substansinya adalah disiplin formal, materi PKn dapat diambil dari teori politik seperti kewarganegaraan atau ilmu kewarganegaraan. Logikanya, berangkat dari kajian kewargaan yang merupakan bagian dari teori politik, materi yang ditampilkan PKn berpusat pada mayoritas politik pemerintahan pemerintahan yang kemudian, pada saat itu, sebenarnya harus diubah sesuai dengan tingkat kebutuhan belajar atau disebut esensial human latihan (Numan Somantri, 2001). Pancasila memasukkan substansi (isi) PKn yang bersifat formal. Menurut Sapriya (2007), substansi desain konvensional harus serupa dan non-debatable (non-debatable, given) karena merupakan komponen perekat dan pemersatu negara yang akan membentengi jiwa identitas Indonesia. Numan Somantri (2001) menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai materi pendidikan kewarganegaraan Indonesia yang "Harusnya Agung", termasuk Indotrinas yang tak terhindarkan, yang harus disamakan kepada warga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu salah satu investigasi sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit pengertian atau penjelasan tentang ide-ide atau contoh-contoh yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut. (Neuman: 2003). Motivasi di balik eksplorasi ini adalah untuk meningkatkan poin baru yang dikenal di wilayah lokal yang lebih luas, memberikan garis besar tema yang mendasar, merangkum pemikiran dan mengembangkan hipotesis spekulatif. Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi Pustaka (library research) sebagai bahan literatur yang dapat menyajikan data dan disertai dokumen pendukung yang menjadi referensi penting dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Pendidikan antikorupsi adalah sebuah gagasan kerangka pembelajaran tentang kemerosotan di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji, khususnya kekotoran dan meningkatkan perhatian publik untuk mengumpulkan pemahaman tentang risiko dan hasil yang akan diperoleh. dari perilaku yang merosot. Fokus utama dari instruksi memusuhi kekotoran batin adalah untuk menyajikan dan memberikan informasi tentang kekhasan peristiwa yang menggabungkan aturan, akibat dan sebab, seperti halnya terus memperluas keakraban dengan demonstrasi kriminal kehinaan.

Untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi sangat berhasil melalui pengajaran, maka pelatihan adalah suatu proses pembentukan karakter dan perubahan watak mental yang terjadi pada siswa, dan melalui sekolah layak untuk diukur dengan baik dan efektif tentang perilaku kemerosotan. (Depdiknas, 2009:3).

Menurut Nurdin (2004: 178) Persekolahan anti korupsi adalah suatu cara memberikan pengaturan dan mencegah demonstrasi kehinaan yang dilakukan melalui pengajaran formal dan non-formal. Sekolah anti kekotoran tidak hanya selesai dalam menghadirkan nilai-nilai permusuhan kepada siswa, tetapi terus diselesaikan dan terus pemahaman, apresiasi dan pengalaman melawan nilai-nilai kekotoran menjadi kecenderungan sehari-hari.

Melawan pendidikan anti korupsi adalah pekerjaan yang disadari dan diatur untuk memahami proses pendidikan dan pembelajaran yang mengutuk permusuhan terhadap nilai-nilai kehinaan. Selanjutnya, pelatihan melawan kemerosotan tidak hanya menekankan pada perspektif intelektual atau informasi, tetapi juga menekankan pembentukan karakter (penuh perasaan), dan kesadaran moral dalam memerangi perilaku yang merosot. Sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammad Nuh dalam bukunya Agus Wibowo (2013:38) bermusuhan dengan didikan kehinaan berarti menjadikan usia muda yang berakhlak mulia dan menentang perbuatan keji. Hal ini sesuai dengan penilaian Haryono Umar yang juga ditentukan oleh Agus Wibowo (2013: 38), yang menyatakan bahwa musuh dari latihan kehinaan adalah menciptakan orang yang baik agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam kekotoran sejak awal. Pola pikir musuh kekotoran harus diterapkan sejak awal, kemudian, pada saat itu, dalam beberapa tahun ke depan akan ada zaman yang memusuhi kekotoran. Untuk mencapai hal ini, pengajaran pelatihan anti kekotoran batin lebih tepat menggunakan metode yang terbuka, dialogis, bertele-tele dengan tujuan dapat meningkatkan kapasitas keilmuan siswa dalam membimbing rasa minat, watak dasar, dan bertekad untuk memiliki penilaian.

Tujuan pendidikan anti korupsi berarti menyiapkan usia yang lebih muda untuk memiliki budaya kejujuran (hostile to debasement) melalui berbagai latihan di sekolah termasuk pelaksanaan administrasi berbasis sekolah, latihan pembelajaran, dan penyesuaian dengan tujuan agar setiap individu dapat menjauhinya. dari, menolak, melawan, atau mencegah semua jenis representasi yang salah dan berbagai aktivitas yang memicu penurunan nilai. pada demonstrasi kekotoran batin. Secara khusus, instruksi memusuhi kekotoran batin bermaksud untuk: (1) membentuk kehidupan sekolah sebagai komponen wilayah lokal melalui pembentukan iklim belajar dengan budaya kejujuran (melawan kehinaan), khususnya: asli, terlatih, cakap, berdedikasi, lugas, bebas, masuk akal, gagah berani, penuh perhatian, dan mulia (ketenangan); (2) memupuk kemampuan hati/tenang, suara kecil mahasiswa melalui ruang emosi sebagai orang-orang yang menunjukkan kepedulian dan secara konsisten menjaga kualitas sosial sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air, dan dijunjung oleh pemahaman publik yang kokoh; (3) mendorong mentalitas, praktik, kecenderungan yang mengagumkan sesuai dengan semua kualitas inklusif dan kebiasaan ketat cara hidup negara; (4) menancapkan jiwa otoritas yang ahli dan dapat diandalkan sebagai masa depan negara; (5) menyusun administrasi secara terbuka, lugas, cakap, dan cakap (Puskurbuk, 2012).

Fokus prinsip pendidikan anti korupsi adalah pengembangan kehormatan sosial di antara semua individu sekolah, sehingga semua individu sekolah memiliki perhatian yang

tinggi untuk secara konsisten bersikap lugas, terkendali, penuh perhatian, suka menolong, mendasar, bebas, masuk akal, gagah berani, dan peduli. kebutuhan pedoman materi. . Sebagai ciri dari pelatihan karakter, instruksi melawan kekotoran batin adalah penting untuk kemajuan karakter setiap orang. Upaya ini adalah konsekuensi dari siklus instruktif dari perspektif yang luas. Konsekuensi dari pelatihan akan keterampilan, kemampuan, dan kemampuan untuk bertindak. Atau sekali lagi sesuai dengan ungkapan yang dipesan Bloom (1956) hasil instruktif menggabungkan perspektif intelektual, psikomotor, dan penuh perasaan.

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar

Proses pembelajaran PPKn tentunya harus dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis. pola pembelajaran saintifik dan terukur akan mengembangkan kompetensi saintifik pada siswa. metode remodeling nilai-nilai ilmiah pada siswa tentunya menjadi tolak ukur untuk mencapai tujuan pelatihan yang ingin dicapai. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PKn dengan menggunakan model project citizen learning seringkali dilakukan melalui beberapa tahapan.

Implementasi Materi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran PKn. metode pelaksanaan materi pendidikan antikorupsi harus membuat beberapa unsur proses implementasi hal ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan yaitu acara Kurikulum Pembelajaran PKn. Isi jalinan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari hukum dan peradilan nasional yang diajarkan dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui materi ini, materi tentang pengertian korupsi sering kali disisipkan dengan tujuan agar siswa siap memahami arti dari kata tersebut maka dari itu definisi korupsi dengan benar dan tepat siswa siap menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar dan siswa siap menjelaskan macam-macam korupsi.

Melalui pembelajaran pendidikan antikorupsi, siswa akan lebih berkontribusi dalam mengembangkan nilai atau sikap antikorupsi pada siswa. Isi materi pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn dilakukan melalui beberapa hal, salah satunya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran yang terdiri dari pertama, pemahaman tindak pidana korupsi sampai dengan yang kedua, upaya dan partisipasi dalam pemberantasan korupsi. Kedua materi tersebut disampaikan pada pertemuan utama dengan durasi dua kali 45 menit. Hal ini sering dimaksudkan agar siswa dapat menyerap berbagai masalah dan pemahaman dasar tentang korupsi secara umum, agar pada pertemuan kedua siswa akan disajikan berbagai masalah tentang korupsi untuk diselesaikan melalui model pembelajaran warga proyek. Dengan harapan peserta siap mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam materi pendidikan anti korupsi menjadi solusi permasalahan korupsi yang terjadi.

Pada dasarnya metode penerapan materi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PKn secara umum telah dikembangkan pada setiap mata pelajaran yang diselenggarakan. Hal ini seringkali mengingat bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh lembaga sekolah khususnya guru mata pelajaran PPKn adalah bagaimana konsep nilai esensial dalam materi antikorupsi sering dikembangkan dalam beberapa hal, baik dalam acara pembelajaran PKn maupun pembelajaran PKn. kurikulum yang berisi materi pendidikan antikorupsi sehingga proses pembelajarannya dikelola oleh guru. agar setiap komponen dalam pembelajaran sering terintegrasi sebagai satu kesatuan dalam perangkat pembelajaran.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn tentunya akan bermuara pada sikap dan kepribadian ulama yang progresif sehingga mampu mengungkap berbagai permasalahan terkait berbagai korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan pendidikan antikorupsi yang diajarkan di tingkat sekolah dasar, maka akan menjadi ide ilmu antikorupsi di masa depan yang akan menyoroti sikap antikorupsi. Implementasi ini akan menjadi acuan bagi guru untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar yang bertumpu pada dua konsep, yaitu proses pembelajaran berbasis warga proyek dengan langkah-langkah yang dikembangkan secara

sistematis dan oleh karena itu pencapaian akhir pembelajaran. , yaitu tercapainya pemahaman nilai. dan sikap anti korupsi.

SIMPULAN

Implementasi materi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn biasa dilakukan melalui tahap mengembangkan kurikulum pembelajaran PPKn hal ini bisa disisipkan melalui materi sistem hukum dan peradilan nasional. Pada bab ini akan disisipkan pendidikan antikorupsi yakni materi tentang pengertian tindak pidana korupsi dan materi upaya dan peran serta pemberantasan korupsi.

Dengan diterapkan dan dikembangkan Pendidikan Antikorupsi serta menanamkan sikap kejujuran kepada siswa SD merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi di setelah mereka besar dan bergabung di masyarakat. Agar siswa lebih mengerti tindakan baik dan buruknya hal yang dilakukan dan mengerti apa dan bagaimana bahayanya Korupsi. Mendirikan kesadaran, kejujuran, semangat belajar, dan dimulai dari diri pribadi hal ini sangat lah penting ditanamkan sedari kecil karena dengan hal sederhana seperti ini dapat membangun sugesti kepada kita sewaktu dewasa agar melakukan hal yang baik dan bijak.

Memberikan pelajaran atau materi pendidikan anti korupsi sedari sekolah dasar. karena hal ini dapat membantu calon penerus bangsa agar tertahan dan tertanam di dalam hatinya bahwa tindak korupsi merupakan tindakan yang salah dan keji. Sehingga ketika kelak sudah dewasa nanti dan bergabung dimasyarakat tidak melakukan tindakan Korupsi. Jika guru menanamkan sikap jujur kepada siswa sejak pertama masuk ruang sekolah, siswa dapat memahami dan mendalami sikap jujur di setiap sesuatu tindakan yang dijalaninya kelak sudah dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, T. (2009). Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan*, Vol. IV. No 2.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *REFLEKSI EDUKATIKA : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 9, No.1.
- Nawawi, I. (2016). Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran Di Sekolah Dasar. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, Vol. 25, No1.
- Nurdin, Muhammad. (2014). Pendidikan Antikorupsi (Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi Di Sekolah). Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Semma, Mansyur. (2008). Negara dan Korupsi : Pemikiran Mughtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Agus Wibowo. 2013. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Budimansyah, D. (2008). Revitalisasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui praktik belajar kewarganegaraan (project citizen). *Civicus*, 1(2), 179–189.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2001. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Wijayanto. 2009a. Mengukur Tingkat Korupsi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanto. 2009b. Memahami Korupsi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educationist*, II(2), 134–143.
- Sutrisno. (2016). Peran ideologi Pancasila dalam perkembangan konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 41–49.

Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan.
Bandung: Alfabeta.